

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era yang modern dan maju seperti sekarang, terdapat banyak sekali fasilitas pembayaran yang dilakukan secara digital (*non fiat*) baik yang dikelola oleh bank dengan menggunakan aplikasi-aplikasi bank secara digital maupun yang tidak dikelola oleh bank, yaitu dengan menggunakan teknologi baru menggunakan algoritma *smart contract* sehingga istilah *cryptocurrency* pun muncul. Sejarah dari munculnya *cryptocurrency* sendiri yaitu berasal dari sebuah laporan resmi atau proposal yang diterbitkan pada tahun 2008 dengan inisial seseorang yang memiliki nama samaran yakni “Satoshi Nakamoto”. Yang belum diketahui hingga sekarang tetapi dapat terlacak sebagai seseorang yang tinggal di wilayah Temple City, California, Amerika Serikat.

Laporan tersebut diterbitkan melalui cetakan sebagai kriptografi dan memiliki tampilan yang begitu mirip dengan makalah akademis. Motivasi awal dari penciptaan di balik *cryptocurrency* pertama di dunia yaitu *bitcoin* adalah untuk memperbarui dan mengembangkan sebuah sistem pembayaran agar lebih mudah, cepat dan tidak memerlukan pihak ketiga sebagai transaksinya. Tidak seperti uang tunai saja yang memungkinkan menggunakan transaksi elektronik tetapi juga *cryptocurrency* banyak karakteristik yang menguntungkan dari uang

tunai fisik itu sendiri.¹ Untuk memahami fitur khusus dari mata uang *fiat* (fisik) dan keinginan besar untuk mengembangkan mata uang digital, dimulai dari beberapa analisis dengan mempertimbangkan transaksi dengan menggunakan algoritma kriptografi secara sederhana.² Seketika itu *cryptocurrency* mulai dikenal dan berpengaruh di dunia, salah satunya *bitcoin* ketika dengan dilakukannya pembayaran pertama dengan sistem pembayaran elektronik berdasarkan *cryptographic*.

Beberapa yang dikemukakan oleh komunitas *bitcoin*, organisasi *cryptocurrency*, para *miner* atau penambang *bitcoin* pada forum *bitcointalk*, menyebutkan bahwa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh *cryptocurrency* adalah sistem pembayaran elektronik yang berdasarkan bukti algoritma kriptografi yang tidak dapat dipalsukan dan bukan dengan asas kepercayaan, sebuah sistem algoritma yang memungkinkan dua pihak yang bersedia untuk bertransaksi secara langsung satu sama lain tanpa memerlukan pihak ketiga yang terpercaya. Transaksi yang secara komputerisasi secara cepat dan selalu tercatat dalam *blockchain* akan melindungi penjual dari penipuan, dan mekanisme *escrow protocol* rutin dapat dengan mudah diterapkan untuk melindungi pembeli.³

Pada 3 Januari 2009, Satoshi Nakamoto membuat 31.000 algoritma pemrograman dan di perkenalkan di internet yang kemudian algoritma itu disebut

¹ Berentsen and Schär.2018.*A Short Introduction to the World of Cryptocurrencies*.Federal Reserve Bank of St. Louis Review.First Quarter,100(1). pp. 1-16.[Daring] Dalam <https://doi.org/10.20955/r.2018.1-16>.Diakses pada tanggal 30 Januari 2022.

² Nakamoto Satoshi.2008.*Bitcoin: A Peer-to-peer Electronic Cash System*. pp. 1.[Daring] Dalam <https://www.bitcoin.org>. Diakses pada tanggal 30 Januari 2022.

³ Allen and Gledhill.2021.*Escrow For Crypto Asset: Bridging the Trust Gap*.Asian Commercial Law Firm Legal Service Local and International Company, and Financial Institutions.First Copy.pp. 3-6.

sebagai *bitcoin*. Perlu diketahui bahwa *bitcoin* sendiri dapat diartikan sebagai bagian dari *cryptocurrency* yang tidak memiliki bentuk fisik seperti uang *fiat* (kertas), uang *fiat* logam (koin), apalagi logam mulia seperti emas. Memang *bitcoin* sendiri adalah algoritma yang terkumpul dari berbagai *cryptographic*, *bitcoin* sendiri memiliki *total supply maximal* 21 juta digital algoritma sehingga tidak teridentifikasi siapa pemiliknya. *Bitcoin* juga sebagai *cryptocurrency* yang bersifat keuangan terdesentralisasi, sehingga *bitcoin* sendiri tidak diatur atau dijamin oleh otoritas pusat pemerintahan tertentu maupun Bank Dunia.

Namun keberadaan *cryptocurrency* yang saat ini sudah ramai digunakan untuk bertransaksi di berbagai negara-maju maupun negara-negara berkembang seperti Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Australia, Finlandia, Singapura, serta negara-negara lainnya di dunia. *Bitcoin* sebagai *digital asset* atau alat yang merupakan bagian dari komoditi yang dibuat dalam bentuk digital mempunyai kelebihan bagi para penggunanya untuk lebih praktis dalam melakukan pembayaran secara langsung serta dijadikan alat untuk berinvestasi.

Di tahun 2017, terdapat beberapa negara yang secara terang-terangan menolak untuk penggunaan *cryptocurrency*. Beberapa negara tersebut diantaranya adalah China, Bolivia, Vietnam, Rusia. Namun dalam penelitian ini, peneliti akan memilih China sebagai objek penelitian terkait pelarangan semua aksi dari penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi dalam negeri maupun transaksi luar negeri. Karena dilihat dari berbagai macam referensi yang ada negara-negara maju khususnya dalam hal ini adalah negara pesaing ekonomi China yaitu Amerika Serikat merupakan salah satu dari negara maju yang secara

khusus melegalkan transaksi *cryptocurrency* sebagai sarana inovasi dari pembayaran di era modernisasi. Namun hal itu tidak terjadi pada negara China yang cenderung lebih konservatif terhadap penggunaan *cryptocurrency* sebagai metode pembayaran di negara mereka.

China merupakan salah satu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dalam satu dekade belakangan. China sebagai negara yang berdaulat pada 1 Oktober 1949, Mao Tse Tung akhirnya memproklamasikan pendirian Republik Rakyat China (RRC). China juga merupakan salah satu negara terbesar di dunia dengan luas wilayahnya sebesar 9.596.960 km². Luas wilayah ini menjadikan China sebagai negara terbesar ke-4 di dunia.⁴

China yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia dan sebagai salah satu negara dengan paham komunis terbesar di dunia, maka China harus bertindak secara efektif dan efisien untuk menjaga stabilitas jalur perekonomian dalam negeri maupun luar negeri. Dari berbagai hal yang terjadi di China, terdapat beberapa hal yang sangat penting yang dapat mengancam stabilitas ekonomi di negara tersebut. Salah satunya adalah keberadaan *cryptocurrency* yang telah dilarang secara terang-terangan di China sebagai alat pembayaran. Kebijakan tersebut beberapa diantaranya diputuskan dari pernyataan berbagai instansi negara China.

China mengabaikan fungsi *cryptocurrency* sebagai “mata uang”, secara eksplisit menyatakan bahwa secara khusus yaitu *bitcoin* sejatinya tidak dapat berfungsi seperti mata uang tanpa adanya alat pembayaran yang sah. Pemerintah

⁴ Ririn, Darini.tt.*Garis Besar Sejarah China era Mao*.pp. 22.

China juga memiliki beberapa kekhawatiran tentang kemajuan *cryptocurrency* yang di duga memengaruhi kontrolnya terhadap sistem pembayaran domestik atau dalam negeri. Kekhawatiran ini telah dilakukan oleh pemerintah China dalam tindakan kerasnya terhadap beberapa organisasi, perusahaan keuangan dan perusahaan teknologi lainnya yang mendominasi pembayaran ritel domestik, membuat uang bank sentral semakin tidak relevan.

Lebih parahnya lagi China juga telah mewaspadaai salah satu dari *cryptocurrency* baru yang dikembangkan oleh Amerika Serikat yang disebut *stablecoin*. *Stablecoin* adalah *cryptocurrency* yang mempertahankan nilai stabil dengan menggunakan *underlying asset* mereka adalah *US Dollar* didukung oleh penyimpanan mata uang *fiat* dan dapat berfungsi sebagai alternatif mata uang *fiat* yang sama dalam melakukan transaksi pembayaran.⁵ *Stablecoin* adalah jenis mata uang virtual atau *cryptocurrency* yang mekanismenya ditetapkan untuk meminimalkan harga fluktuasi dan 'menstabilkan' nilainya. Secara historis, *stablecoin* telah digunakan untuk membayar pembelian virtual lainnya mata uang seperti *Bitcoin*, di pertukaran *cryptocurrency* yang tidak menerima uang tunai, dan sebagai aset *safe-haven* selama periode ketika virtual lainnya mata uang mengalami harga yang signifikan menurun.

China pada awalnya berhati-hati dalam pengembangan dan penerapan teknologi *stablecoin blockchain*. Diantara atribut teknologi yang paling terkenal adalah relatif anonimitas dan kekekalan informasi, sebagai setiap transaksi

⁵ Prasad, Eswar.2021.*China Has Good Reason to Fear Bitcoin*.Cornell University and the author of *The Future of Money: How the Digital Revolution Is Transforming Currencies and Finance*.pp. 4-5.

blockchain memiliki catatan digital dan tanda tangan yang dapat diidentifikasi, divalidasi, disimpan dan bersama. Oleh karena itu, teknologi ini dapat menjadi pedang bermata dua untuk Partai Komunis China, karena bertentangan dengan upaya pemerintah untuk menyensor konten yang dianggap sensitif dan, lebih dari itu istilah umum, upaya untuk menegaskan kedaulatan dunia maya. Namun, setelah pada awalnya mengamati kemunculan teknologi *blockchain* dengan perhatian, pemerintah pusat China semakin melihatnya sebagai ancaman, seperti yang terjadi pada sebagian besar yang muncul teknologi. Sejak peluncuran lima tahun rencana pada tahun 2017 dan rilis panduan pertama tentang teknologi *blockchain* dan Pengembangan Aplikasi oleh Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi negara china, Partai Komunis China semakin mempertimbangkan bahwa *blockchain* bisa menjadi ancaman ekonomi, politik dan aset geopolitik bagi negara, jika tidak dibimbing dengan baik.⁶

Perusahaan seperti *paypal*, mereka bertaruh bahwa mereka bisa mengatasi tantangan regulasi dan politik untuk mencapai adopsi dan perubahan yang luas bagaimana orang membuat lintas batas pengiriman uang dan pembayaran untuk konsumen barang dan jasa. Sampai saat ini, perbedaan utama antara *stablecoin* telah menjadi mekanismenya untuk menjaga stabilitas (dijamin atau tanpa agunan) dan tata kelola (terpusat atau terdesentralisasi).⁷ *Stablecoin* yang dijamin sering kali didukung oleh mata uang fiat, komoditas (misalnya,

⁶ Ekman, A.2021.*China Blockchain and cryptocurrency ambition*. European Union institute for security studies Belgium.China policies and standardization.

⁷ Hanna K and Klaudia J.2020.*Stablecoin – the stable cryptocurrency*.Regional Excellence Initiative 2019–2022” of the Ministry of Science and Higher.[Daring] Diakses dalam <https://doi.org/10.31268/StudiaBAS>.Diakses pada tanggal 26 Mei 2022.

emas) atau aset lain seperti surat-surat perusahaan. *Stablecoin* tanpa jaminan bergantung pada algoritma komputer untuk menghasilkan keputusan kebijakan (misalnya, menyesuaikan pasokan dengan "membakar" atau menjual koin) untuk mempertahankan nilai yang stabil. Dalam kedua kasus, pengaturan pemerintahan, termasuk peran penerbit atau regulator dapat bervariasi sesuai dengan kasus.

Pemerintah China juga telah membidik organisasi maupun institusi dari penambangan *cryptocurrency* di wilayah mereka, di mana sejumlah besar penambang *bitcoin* dengan dalih daya komputasi dikhususkan untuk memvalidasi transaksi di jaringan *cryptocurrency*, dengan imbalan-imbalan dalam bentuk *bitcoin* dan akan ditukar ke *stablecoin*. Hal semacam itu telah berkembang di China karena China sendiri terkenal dengan ketersediaan energi dan perangkat keras komputer yang cukup murah, menjadikannya pusat global kegiatan tersebut. Pemerintah China khususnya Presiden Xi Jin Ping beralasan dengan dampak lingkungan, dalam hal konsumsi energi dan komputerisasi adalah hal yang sangat besar. China merupakan negara yang berada di tengah-tengah potensi energi saat ini mencoba untuk melepaskan ketergantungannya pada energi yang tidak terbarukan, penambangan *cryptocurrency* jelas tidak akan ditoleransi.⁸

Pemerintah China juga menyebut proyek Mata Uang Digital/ Pembayaran Elektronik (DCEP), dan akan dipertimbangkan sebagai bagian dari Strategi

⁸ Nicholas, G.2014. *Regulatory Overview of Virtual Currency*, Oklahoma Journal of Law and Technology, Vol. 10 : No. 1 , Article 2. University of Oklahoma College of Law Digital Commons

Partai Komunis China untuk menggunakan langkah "informatisasi pusat" sebagai alat dalam mengembangkan digital ekonomi dan sengaja ingin mengubah China menjadi kekuatan super dalam penggunaan digital *currency*, pemerintah china dan organisasi industri ekonomi mencari, mengumpulkan dan menganalisis data besar seputar transaksi harian pengguna yang terjadi dalam negeri.⁹ Halangan mata uang digital *stablecoin cryptocurrency* ini merupakan langkah besar dalam memperluas otoritarianisme digital partai, dengan menambahkan data keuangan *real-time* ke dalam strategi Partai Komunis China sebagai bentuk pemerintahan berbasis teknologi. Tidak diragukan lagi, upaya pemerintah China untuk memanfaatkan kecerdasan buatan dan data besar untuk penanganan masalah domestik yang lebih kuat akan pengawasan.¹⁰

Pada akhir tahun 2021, *People Bank of China* melarang semua transaksi *stablecoin cryptocurrency*. PBOC mengutip peran bahwa *stablecoin cryptocurrency* dalam memfasilitasi kejahatan keuangan serta menimbulkan risiko yang berkembang bagi sistem keuangan China sendiri karena sifatnya yang sangat bergantung pada mata uang asing. Sebelumnya, orang-orang penting di China menyiasati kontrol modal dengan membeli real estat asing, membuat langkah kreatif untuk perdagangan internasional, dan bahkan memaksa karyawan-karyawan dari perusahaan mereka untuk mentransfer uang ke rekening bank luar negeri.¹¹ Dengan *Stablecoin*, penduduk di China dapat memperoleh

⁹ Duffie D.2022."Digital Currencies: The US, China, and The World at a Crossroad".Board of Trustees of the Leland Stanford Stanford Junior University.

¹⁰ Fanusie, J. Yaya.2021.*China's Digital Currency: Adding Financial Data to Digital Authoritarianism*. Center for a New American Security Study.

¹¹ Prasetya N.2019."Analisis Kebijakan Tiongkok Terhadap Perkembangan Cryptocurrency *Journal of International Relations*". Volume 5 Nomor 2. Halaman 361-367.

aset mata uang asing dengan lebih mudah, dan tentunya bebas dari pengawasan otoritas China. Mengingat sifat *Stablecoin Cryptocurrency* yang terdesentralisasi, mereka dapat digunakan untuk menghindari kontrol modal jauh lebih mudah daripada pertukaran mata uang konvensional yang menggunakan sistem perbankan yang peredarannya mudah di kontrol oleh Pemerintah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin meneliti tentang bagaimana kebijakan China melarang penggunaan *stablecoin cryptocurrency* secara luas sebagai alat transaksi di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji karena China sebagai salah satu negara yang besar dengan kekuatan geografi dan ekonomi yang besar tersebut melarang warga negaranya untuk menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi resmi di negaranya. Lazimnya, negara sebesar China menerima kemajuan teknologi dan menggunakannya di negaranya, bahkan meskipun itu dalam bentuk kemajuan teknologi di bidang keuangan. Oleh sebab itu, penulis ingin meneliti mengenai hal tersebut dengan lebih mendalam dalam karya tulis ini. Penelitian ini berfokus pada peran Negara China dalam pelaksanaan pelarangan kebijakan luar negeri dalam penggunaan *stablecoin cryptocurrency* sebagai penggunaan transaksi dalam dan luar negeri.

Penulis mengumpulkan beberapa referensi sebagai komparasi dalam penelitian ini, antara lain:

Referensi Pertama tentang “*Regulatory Overview of Virtual Currency*” sebuah jurnal yang ditulis oleh Nicholas Godlove, dimana jurnal ini telah menginformasikan dan memberitahu kemampuan dasar-dasar dari

cryptocurrency. *Cryptocurrency* sendiri secara tidak langsung sangat menjanjikan kemudahan dan keamanan dalam memfasilitasi secara besar jual beli luar negeri/internasional, sedangkan jurnal ini juga menjelaskan konsep dalam bentuk yang baru lahir saat ini adalah dimana pemerintah yang tidak terlalu efektif dalam mengurus tindakan kriminal dari *cryptocurrency* secara jelas. Namun, di sisi lain dengan meregulasi *cryptocurrency* sendiri menjadi sebuah kelayakan karena hal tersebut untuk mempermudah untuk mengirimkan uang secara langsung tanpa pihak ketiga melalui internet dan sudah seharusnya pemerintah dari sebuah negara harus ketat merespon. Jurnal ini juga menyusun beberapa hal yang sederhana seperti undang-undang yang harus disahkan untuk membawa penggunaan *cryptocurrency* sejalan dengan lainnya bentuk transmisi mata uang standar, dan bagaimana undang-undang tersebut akan menghilangkan aspek-aspek negatif dari *cryptocurrency* dengan mengizinkan Negara dalam melakukan pengembangan dan penggunaan teknologi tersebut secara berkelanjutan.

Referensi Kedua tentang “*Stablecoin – the stable cryptocurrency*” sebuah jurnal yang ditulis oleh Hanna Kołodziejczy dan Klaudia Jarno, di jurnal ini menerangkan bahwa menerangkan apa itu *stablecoin* dan menerangkan segala hal yang berurusan dengan topik yang sangat banyak muncul dari *stablecoin*, yang merupakan istilah-istilah penting yang digunakan untuk merujuk ke *stablecoin cryptocurrency*. penulis dalam jurnal ini meneliti sejumlah beberapa pertanyaan penting dalam dunia *stablecoin*, yaitu: apa itu *stablecoin*, kapan mereka muncul, apakah mereka bisa digunakan dan apa karakteristik dari

stablecoin yang paling umum. Penulis harus juga menghadirkan sebuah pengelompokan dari suatu hal tertentu tentang *stablecoin* berdasarkan mekanisme yang digunakan untuk menstabilkan nilainya.

Referensi Ketiga tentang “*China Blockchain and Cryptocurrency Ambitions*” sebuah jurnal yang ditulis oleh Alice Ekman, seorang senior analyst untuk institute dalam analisa pertahanan, di jurnal ini menerangkan bahwa China sendiri secara aktif dengan gencar mempromosikan bentuk alternatif dari *stablecoin cryptocurrency* yang lebih terpusat dan terkontrol dari penggunaan *blockchain*, yang berbeda secara signifikan dari konsep awal dan fitur dari teknologi *blockchain* itu sendiri. Pemerintah China juga sedang berinvestasi di aplikasi keuangan teknologi *blockchain* dalam negeri dan berencana untuk meluncurkan mata uang digital versi mereka sendiri yaitu digital yuan, mata uang kripto yang diawasi langsung oleh Bank Rakyat China, tetapi juga di banyak aplikasi tata kelola dari teknologi, misalnya perencanaan tata kelola kota dan pengembangan kota pintar (*smart city*), manajemen data di bidang kesehatan dan pangan, kepolisian, sensor poin masyarakat. Ambisi *blockchain* China melampaui itu wilayah nasional. Dengan meluncurkan dan menguji berbagai jenis aplikasi *blockchain* yang sekiranya dapat dikontrol, memiliki visi dan misi dalam norma dan standar negara China, dan mulai mempromosikan jaringan pembayaran digital yuan secara universal.

Referensi keempat “*China Digital Currency Adding Financial Data to Digital Authoritarianism*” sebuah jurnal yang ditulis oleh Yaya J. Fanusie dan Emily Jin, menerangkan bahwa ada banyak detail operasional tentang

pembayaran elektronik China masih berkembang, di jurnal ini secara jelas menjelaskan bahwa dengan memajukan proyek adalah kunci dari strategi grand fintech dari pemerintah China dan adanya kemungkinan tujuan meningkatkannya otoritarianisme digital yang dituju oleh pemerintah China. Meskipun tidak mungkin bahwa Sistem pembayaran digital China akan mendorong internasionalisasi renminbi yang lebih luas, tanpa adanya reformasi hukum dan ekonomi di Sistem keuangan China, di jurnal ini juga masih menjelaskan bahwa China sendiri akan menimbulkan risiko serius bagi Amerika Serikat soal kepentingan keamanan nasional. Pembayaran digital China akan memberi negara tersebut keunggulan dalam memanfaatkan teknologi keuangan berbasis ilmu komputer untuk perekonomian dalam negeri mereka. Keuangan yang dikontrol secara relatif real-time data dan diberikan kepada Bank of China oleh sistem akan memberikan kontrol yang lebih besar kepada Partai Komunis China atas orang-orang China secara Individual, perusahaan dan organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri. Pemerintah China dapat memperoleh pengaruh yang kuat di pengembangan sistem keuangan global masa depan. Risiko ini harus dijalankan sebagai ajakan untuk bertindak secara internasional untuk melawan negara adidaya dan menahan kebijakan Amerika Serikat yang merugikan pemerintahan China. Di jurnal ini menerangkan jika China ingin melawan otoritarianisme digital Amerika Serikat yang berkembang, China harus menyesuaikan tata negara ekonomi untuk mengatasi gempuran teknologi asing yang mengubah sistem keuangan secara global.

Referensi Kelima “*Digital Currencies: The US, China, and The World at*

a Crossroad" Jurnal yang ditulis oleh Darrel Duffie dan Elizabeth Economy, di jurnal ini menerangkan bahwa Amerika Serikat, China, dan seluruh dunia berada di persimpangan jalan dalam pengembangan *cryptocurrency* dan inovasi lain dalam pengaturan keuangan. Peristiwa ini dibentuk oleh banyaknya kebijakan nasional dan kekuatan pasar akan memiliki konsekuensi penting untuk kepentingan privasi, pertumbuhan ekonomi, pendekatan keuangan, dan pengaruh internasional, antara lain yaitu tujuan dari negara adidaya Amerika Serikat. Kemunculan China sebagai penggerak signifikan pertama di arena Bank Central Digital memperkuat kontrol domestik dari Partai Komunis China dan menempatkan Beijing pada posisi yang sangat kuat untuk menyediakan sebuah teknologi *digital currency* ke negara lain dan untuk menetapkan standar internasional yang selaras tetapi dengan mengedepankan sistem pemerintahan yang otoriter.

Tanpa kebijakan dari Amerika Serikat yang tidak hati-hati, tentunya hal ini dapat melemahkan privasi dan dominasi dolar Amerika Serikat sebagai sumber pengaruh *global economic* dan *global strategic*. Di jurnal ini mengomentari bahwa Pemerintah Amerika Serikat harus terlebih dahulu menentukan sifat yang sesuai dan peran dari *stablecoin cryptocurrency* sebagai sistem pembayaran dalam negara nya sendiri secara ekonomi. Sehingga banyak kritik yang harus dilakukan Amerika Serikat untuk meningkatkan sistem pembayarannya dalam persiapan untuk ekonomi digital masa depan tidak bergantung pada kemunculan *digital currency* China (e-CNY). Di arena internasional, Amerika Serikat tidak mampu memimpin secara inklusif pada

negaranya sendiri dan bersama dengan negara-negara sekutu, mitra mereka dalam menetapkan standarisasi, serta menyediakan teknologi ke negara lain, dan mencegah e-CNY merusak norma-norma demokrasi liberal tentang kebebasan dan hak asasi manusia dengan mengikis pengaruh geo-ekonomi dan strategis Amerika Serikat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diambil rumusan masalah: mengapa China melakukan kebijakan larangan penggunaan *stablecoin cryptocurrency* sebagai alat transaksi di dalam negeri maupun luar negeri dari tahun 2017-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena *cryptocurrency* di dunia internasional, serta untuk mengetahui apa alasan China mengeluarkan kebijakan larangan *stablecoin cryptocurrency* sebagai alat transaksi yang di dalam negeri maupun luar negeri dari tahun 2017-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Untuk menggambarkan mengapa China mengeluarkan kebijakan larangan penggunaan *stablecoin cryptocurrency* dari tahun 2017-

2022. Kemudian, menggambarkan langkah ke depan dari Pemerintahan China dalam menggunakan teknologi *blockchain* dalam transaksi keuangan dalam negeri maupun luar negeri.

2. Secara Empiris.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian-penelitian berikutnya yakni penelitian yang berkaitan dengan alasan penggunaan teknologi *stablecoin cryptocurrency* sebagai transaksi antar negara atau *borderless*.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Peringkat Analisis

Sebuah konsep dasar dari peringkat analisis merupakan salah satu dari beberapa konsep dasar yang sudah lama dikenal dalam studi ilmu Hubungan Internasional. Beberapa perdebatan mengenai peringkat analisis ini mulai muncul di tahun 1960-an dan 1970-an. Diawali oleh David Singer ketika tahun 1961 mengeluarkan karya klasiknya "*The Level of Analysis Problem in International Relations*".¹² Menurut Singer sendiri, peringkat analisis adalah sebuah kerangka kerja yang memiliki tujuan untuk membantu penelitian dan memahami fenomena yang diteliti utamanya dalam urusan politik internasional. Singer juga menyatakan

¹² David J. Singer.1961."The Level-of-Analysis Problem in International Relations".World Politics.Vol 14. No 1.h.77-92.

bahwa dalam melakukan kajian internasional perlu diperhatikan terlebih dahulu level tingkat atau peringkat analisisnya.

Pemahaman dari peringkat analisis dikelompokkan menjadi 3 sub bagian dalam menjelaskan kebijakan dari aktor negara, yaitu sistem, negara dan individu. Peringkat analisis dari sistem menjelaskan pengaruh dari pembagian kekuatan antar negara-negara maju (*super power*) terhadap negara lain.¹³ Sedangkan dari peringkat analisis negara menjelaskan berbagai aktor-aktor yang memiliki kepentingan negara (*national interest*) yaitu para birokrat, kelompok kepentingan dan badan legislatif) di dalam suatu negara berperan dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Peringkat analisis individu sendiri akan menjelaskan bagaimana seorang individu berinteraksi dalam kelompok tertentu (*organizational behaviour*) atau bagaimana faktor individu berpengaruh dalam pengambilan kebijakan luar negeri.¹⁴

Dalam penelitian ini menggunakan peringkat analisis Negara, dikarenakan penelitian ini meneliti tentang peran Pemerintahan Negara China, dalam pengaruh mereka untuk mengeluarkan kebijakan larangan penggunaan *cryptocurrency* dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini bisa terjadi karena interaksi negara menjadi salah satu kemampuan mengatur dan memaksimalkan kekuatan (*power*) yang dimiliki apabila akan berinteraksi dengan negara lain. Lemah atau kuatnya suatu negara dapat diketahui secara umum merupakan perilaku dari kebijakan yang dikeluarkan,

¹³ Olivia Y.2013."Level Analisis dan Teori Hubungan Internasional". Jurnal Transnasional h. 898-899.

¹⁴ John T..1995."International Politics on the World Stage".Connecticut: Dushking Publishing Group.h. 5.

seperti interdependensi dan dependensi itu sendiri. Misalnya, negara kecil yang memiliki power rendah lebih cenderung memiliki atribut domestik yang lemah sehingga membuat negara besar sebagai panutan penyusunan kebijakan luar negerinya. Sebaliknya, negara yang memiliki atribut domestik yang lebih kuat memiliki pengaruh yang besar dalam berinteraksi dengan negara lain dan cenderung menjadi kekuatan yang mendominasi secara luas atau internasional, misalnya dalam kasus ini adalah China.

Dalam salah satu variabel internasional yang penting dapat memengaruhi kebijakan luar negeri dari suatu negara tergantung pada kapabilitas dan *national interest* yang dimiliki oleh negara tersebut dalam konteks interaksinya dengan negara-negara lain. Variabel internasional ini mengacu pada sistem internasional tentang interaksi yang dilakukan oleh negara-negara, dimana setiap negara merupakan bagian dari sistem yang akan menjadi acuan faktor penting, jika terjadi masalah pada suatu negara dalam sebuah sistem internasional, maka tentu akan berdampak pula pada negara-negara lainnya. Selain itu pula sistem internasional juga berkaitan dengan power yang dijadikan pokok dalam memengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri. Oleh karena itu level analisis internasional ini kerap menyiratkan tentang pembagian kekuatan antar negara yang kuat dan negara yang lemah.

Untuk membahas lebih dalam tentang kebijakan atau politik luar negeri suatu negara. Dengan menggunakan peringkat analisis serta juga membahas tentang kebijakan atau politik suatu negara, pemerintahan negara yang bahkan memiliki pandangan berbeda juga dapat berpengaruh dalam sebuah negara turut

mempengaruhi perilaku politik luar negeri negara tersebut, pemerintahan dan individu yang berpengaruh dapat senantiasa menjadi aktor mandiri secara menyeluruh berdasarkan haknya. Misalnya, peringkat analisis level individu lebih cenderung menekankan pada aspek psikologis dan kognitif individu sebagai bahan acuan terpenting dalam memutuskan pengambilan kebijakan dalam negeri maupun luar negeri.¹⁵

Di sisi lain, peringkat analisis negara masih dipercaya sebagai salah satu aspek terpenting pada suatu interaksi internasional mengingat masih berkaitan erat menggunakan hubungan antar-negara, Lembaga ini mempunyai pengambil kebijakan, para birokrat & banyak sekali grup yg bisa dipertimbangkan pengaruhnya terhadap proses pengambilan kebijakan. Dalam hal ini, pemerintahan saling melakukan koordinasi satu sama lain yang mereka buat lalu memilih untuk merumuskan politik luar negeri, pada artian menghormati pendapat satu tanpa mengungguli pendapat lainnya, lantaran negaranya sendiri mempunyai satu tujuan dalam mempertahankan *national interest* mereka dalam menggunakan dan mengeluarkan kebijakan-kebijakannya terkait politik luar negeri. Dari banyak sekali dampak elemen kerjasama inilah lalu didapatkan sebuah kompromi pada merumuskan kebijakan negara.

¹⁵ Temby. O.2013. "What are levels of analysis and what do they contribute to international relations theory?". Dalam Cambridge Review of International Affairs. pp. 1-22.

1.5.2 Landasan Teori

1.5.2.1 Teori National Cyber Security

Kecanggihannya dari Teknologi Cyber Modern dan banyak dampaknya yang secara luas terus meningkat sejak adanya bukti serangan-serangan dari sebuah *malware/cyberattack* yang pertama kali terjadi pada tahun 1988 menjadikan hal tersebut untuk sebagai acuan dari bagian penting untuk strategi pertahanan nasional di beberapa negara. Cyber di era sekarang ini dianggap sebagai sebuah wilayah baru yang terjangkau, tetapi sangat berbeda sekali bahkan bias di katakan terpisah dari konflik darat, laut, udara, dan antariksa. Hal ini tergambar jelas dalam doktrin militer dari negara-negara terkuat di dunia, yaitu Rusia, China, dan Amerika Serikat. Khususnya setiap negara akan menopang pertahanan mereka, dan pada saat yang sama, Negara-negara itu pun bekerja keras untuk mengembangkan senjata Cyber yang bertujuan sebagai pertahanan negara dan memiliki tujuan lain untuk menyelidiki pertahanan cyber dari negara lain.¹⁶

Sejarah dari penggunaan serangan cyber telah digunakan untuk melengkapi kekurangan dari intervensi militer, membalas terhadap kebijakan dan tindakan negara lain, dan hal itu juga digunakan untuk ikut campur dalam pemilu negara lain. Perlombaan dari yang disebut sebagai “senjata dunia maya” ini sangat sengit terjadi tanpa adanya tanda-tanda pengurangan dari penggunaan berbagai Negara secara rahasia. Negara-negara bangsa yang sekarang ini akan menghadapi dilema apakah akan bekerja sama dengan para cyber untuk mengurangi perlombaan senjata dunia

¹⁶ Craig T, “*Net of Insecurity: A Flaw in the Design*,” The Washington Post, May 30, 2015, accessed July 5, 2022, <https://www.washingtonpost.com/sf/business/2015/05/30/net-of-insecurity-part-1>.

maya dan membiarkan Internet berkembang tanpa batas, atau Negara berdaulat akan melawan para pengguna dan penggiat cyber tersebut untuk mencegah dan menempatkan batas-batas di Internet dari Negara dan mencegah ancaman pertumbuhan kejahatan cyber dan evolusinya.¹⁷

Era Revolusi Cyber sendiri ditandai oleh 4 buah momen yaitu Revolusi pertama datang dengan penciptaan dari alat tenun listrik (1784). Revolusi industri kedua datang dengan jalur perakitan (1870), dan revolusi industri ketiga datang dengan terciptanya PLC (Programmable Logic Controller) (1969). Revolusi keempat sedang terjadi di sekarang, semua dikembangkan dan digerakkan oleh sensor, salah satunya adalah perkembangan Artificial Intelijen (AI), dan pengembangan robotic notes (robotika terpadu).¹⁸ Bayangkan jika sebuah sistem yang sangat cerdas dan sistem tersebut memiliki kemampuan dan kemajuan produksi akan prediksi yang akan terwujud ketika sensor dapat memberikan informasi yang disempurnakan tentang semua hal yang berkaitan dengan diri manusia seperti: suhu dan kelembaban, pH dan tingkat nutrisi, untuk menginformasikan praktek dari kejadian alam dan untuk meningkatkan mutu manusia. Atau adanya potensi luar biasa penggunaan Cyber dalam ilmu kedokteran dan informatika biomedis berupa pompa insulin yang dapat memantau kadar gula darah dan menyesuaikan tingkat insulin secara real-time, atau Saringan Medis IBM,

¹⁷ Sanjay G. 2020. “*National Cyber Security Strategy and the Emergence of Strong Digital Borders*” New York State Center for Information Forensics and Assurance, University at Albany. <https://www.albany.edu/cifa/>

¹⁸ Rafiullah K, 2012 “*Future Internet: The Internet of Things Architecture, Possible Applications and Key Challenges*,” in Proceedings of 10th International Conference on Frontiers of Information Technology (FIT) (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 257-260, <https://doi.org/10.1109/FIT.2012.53>

yang, didorong oleh smart algoritme dan AI canggih, memilah riwayat medis lengkap pasien, mencari petunjuk untuk menginformasikan analisis gambar pasien; mempelajari segala sesuatu yang perlu diketahui tentang individu dalam hitungan detik untuk diagnosis yang lebih cerdas dan rencana perawatan yang jauh lebih personal. Tentunya beberapa hal tersebut terlihat sebagai dua mata pisau yang saling memiliki keuntungan dan kerugian bagi sebuah negara.¹⁹

Jadi dengan perkembangan teknologi tersebut, negara akan bertanya-tanya bagaimanakah kita dapat menghindasi aspek negatif dari penggunaan teknologi tersebut seperti tanggung jawab dalam bertahan melawan peretasan sistem, serangan siber yang merusak, dan pencurian data pribadi dari warga negara? Di kota-kota besar dan kota dengan indeks kependudukan tertinggi di mana banyak warga negara saling berbagi informasi, bagaimana kita akan percaya bahwa hal tersebut adalah sesuatu seperti yang mereka katakan? Dan bagaimana kita tahu bahwa data mereka laporkan itu benar dan akurat? Dengan kecanggihan yang tak terbatas ini datang risiko yang luar biasa dalam hal kehilangan keamanan dan privasi, pelanggaran sistem, dan peretasan dalam suatu negara berdaulat.²⁰

Apakah operasi siber terutama dapat dikendalikan, dan Apakah mereka juga dimaksudkan untuk menjadi eskalator, dan apakah tindakan mereka efektif sebagai instrumen dan manuver untuk kebijakan luar negeri? Beberapa Negara tentunya

¹⁹ Federal Commission, 2015 *"Internet of Things: Privacy and Security in a Connected World,"* FTC Staff Report, <https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/federal-trade-commission-staff-report-november-2013-workshop-entitled-internet-thingsprivacy/150127iotrpt.pdf>.

²⁰ Joshua P. 2013 *"The Internet, Cross-Border Data Flows and International Trade,"* SSRN Electronic Journal, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2292477>.

akan melawan karakteristik dari dunia maya, termasuk adanya ketidakpastian efek dan respons, dan kurangnya atribusi dan verifikasi menurut sifatnya untuk menjadi eskalator. Tapi apakah kegiatan Cyber sendiri menjadi satu dorongan untuk menginformasikan kebijakan internasional adalah untuk memahami hal lebih baik dan mengukur realitas kita saat ini. Sebuah Jurnal analisis kebijakan terbaru dari Cato Institute melihat adanya 272 dokumen pertukaran dunia maya antara negara-negara saingan antara tahun 2000 hingga 2016. Dalam kategorisasi pertukaran itu, mereka memperkirakan 32% sebagai gangguan, 54% sebagai spionase, dan 12% sebagai degradasi, atau jenis serangan yang paling merusak, yang dimaksudkan untuk menonaktifkan atau secara fundamental merusak target dari Negara yang mereka tuju.²¹

Yang paling penting, penulis penelitian menyimpulkan bahwa sebagian besar khususnya tidak mendokumentasikan adanya pola pembalasan, dengan secara tersirat menyimpulkan bahwa sebagian besar operasi dunia maya tidak menimbulkan serangan secara tajam, juga tidak menghalangi mereka dari serangan cyber lain. Mereka mengandaikan bahwa tingkat tertentu dari operasi dunia maya adalah norma dan bahwa sementara ruang internet sampai saat ini telah menjadi sebuah wilayah perang politik dan diplomasi koersif, operasi di dunia maya sangat meningkat atau efektif dalam mencapai hasil yang ditentukan. Adanya “Insiden” atau “serangan”, berapa pun jumlahnya, mereka selalu berupaya dalam

²¹ Eduard S. 2019. “The Global Rise of Internet Sovereignty,” <https://codastory.com/authoritarian-tech/global-rise-internet-sovereignty/>. Diakses pada tanggal 5 Juli 2022

mengungkap hal yang berkaitan tentang perang dalam arti politik, hukum, operasi, atau data penting faktual yang sebenarnya.²²

1.5.2.3 Teori Pendekatan Intermestic

Peran era Globalisasi ditandai dengan adanya sebuah jaringan interdependen yang bersifat borderless atau tanpa adanya lintas negara. Sehingga globalisasi dengan sendirinya akan menimbulkan sebuah tantangan tidak hanya terhadap kebijakan dalam negeri suatu negara karena adanya pengaruh global yang secara lintas batas dapat mempengaruhi kebijakan nasional, namun juga menimbulkan banyak tantangan terhadap teorisasi tentang apa esensi kebijakan publik itu sendiri. Di era globalisasi sesungguhnya sangat sulit sekali membedakan mana kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh politik luar negeri dan mana kebijakan yang dipengaruhi oleh politik dalam negeri, karena menurut intermestic kedua hal tersebut akan selalu berkaitan.²³

Proses perubahan kebijakan pun terbentuk dalam konteks adanya keterkaitan tersebut, sehingga dibutuhkan sebuah kerangka teoritik baru yang disebut intermestik. Kebaruan teori intermestik dibangun dari sintesis beberapa kajian sebelumnya yang juga bermaksud untuk menggambarkan proses keterkaitan pengaruh internasional dan domestik dalam perubahan kebijakan. Dalam rangka mengembangkan kajian intermestik yang menyediakan jembatan antara kajian ilmu

²² Brandon V. 2018. "Cyber Strategy: The Evolving Character of Power and Coercion" Oxford Scholarship Online <https://doi.org/10.1093/oso/9780190618094.001.0001>.

²³ Kurniawati D. 2010. "Pendekatan Intermestik Dalam Proses Perubahan Kebijakan: Sebuah Review Metodologis" ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Malang

hubungan internasional yang cenderung membahas perubahan kebijakan dari faktor-faktor internasional, dengan ilmu pemerintahan yang cenderung membahas perubahan kebijakan dari faktor-faktor domestik, diperlukan sebuah model pengkajian. Model ini niscaya bersifat interdisipliner. Bagi disiplin ilmu hubungan internasional, model intermestik sangat dibutuhkan untuk menganalisis dampak hubungan internasional terhadap kebijakan domestik, dan bagi ilmu pemerintahan model intermestik dibutuhkan untuk melihat aspek internasional dalam kebijakan domestik.

Inti dari sebuah perubahan kebijakan dapat diselaraskan melalui beberapa teori yang dibuat dengan kajian pemikiran atau metodologi dengan alur dan pemahaman yang berbeda-beda. Ada beberapa teori dan kebijakan yang dikeluarkan dari penerapan analisa yang berlangsung secara khusus di suatu wilayah negara yang tidak ingin adanya ikut campur tangan dalam proses internasional atau lintas negara, dan ada pula beberapa analisa yang tidak terlalu memperdulikan dengan dengan sebuah perubahan dalam internal suatu negara. Dalam proses perkembangannya terdapat banyak studi yang bersifat adanya korelasi dalam dan luar negeri yang menjadi jembatan dari kedua pendekatan yaitu Transnasional.²⁴

Beberapa Proses perkembangan dari metodologis yang disempurnakan bertujuan untuk menemukan sebuah metodologi baru yang dapat mempertemukan adanya jalan pikiran dari beberapa kelompok penengah antara kajian dalam negeri

²⁴ Goldstein, Judith & Robert Keohane. 1995. *Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions, and Political Change*. Ithaca: Cornell University Press

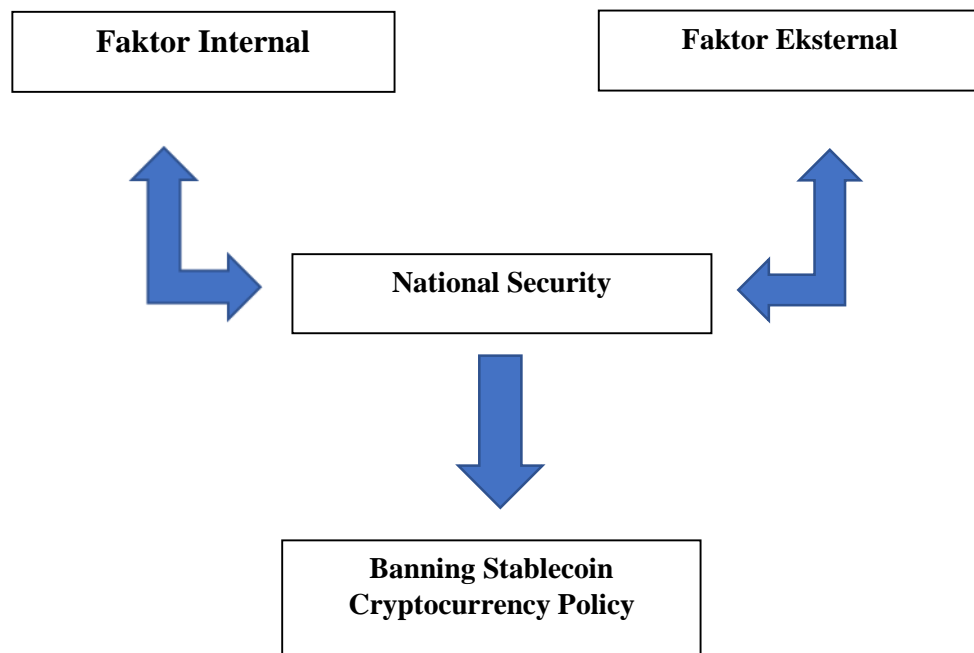
dan kajian luar negeri tersebut. Hal yang perlu dilakukan pertama kali adalah adanya proses untuk mengidentifikasi lebih dalam akan model-model kajian yang sudah ada sebelumnya. Ketika analisa kajian itu dilakukan maka akan mengidentifikasi adanya tiga pendekatan berdasarkan unit analisis tertentu, atau adanya arah perubahan kebijakan. Tiga pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan dalam negeri (domestik), pendekatan luar negeri (internasional), dan pendekatan korelasi perubahan (transnasional). Di dalam pendekatan dalam negeri sendiri memiliki level analisis khusus yang berada di wilayah dalam negeri suatu negara, terdiri dari otoritas, pluralis, sistem, individual, dan koalisi. Sedangkan untuk pendekatan internasional dengan lebih mengutamakan analisa di sektor beberapa aktor-aktor penting luar negeri terdapat 2 model yang sangat berpengaruh bagi perubahan kebijakan, yaitu model neoliberal institusional dan model strukturalis/globalis. Sedangkan untuk pendekatan Transnasional atau batas negara memiliki unit analisis khusus dari aktor-aktor transnasional, yaitu model policy network, model policy deliberative, dan model epistemic community. Sehingga dari yang dikemukakan dari ketiga aspek tersebut, analisa di ketiga sektor ini akan dilakukan tinjauan lebih dalam untuk menelaah cara untuk memperoleh kebenaran di balik model-model yang di analisa tersebut. Penemuan dari teori intermestik sendiri kiranya dapat dikembangkan dari beberapa gabungan dari berbagai model yang ada, dengan memiliki tujuan dan visi kajian pada pentingnya sebuah peran korelasi antara ide dan aktor dalam menentukan alur perubahan kebijakan.²⁵

²⁵ Dryzek J. 1990. *“Discursive Democracy: Politics, Policy, and Political Science”*. Cambridge: Cambridge University Press.

Tulisan yang disajikan berikut ini didedikasikan untuk kepentingan tersebut, Sedangkan yang selanjutnya yaitu mengaplikasikan kerangka konseptual atau landasan teori yang lebih spesifik untuk menggambarkan hal yang berkesinambungan. Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa dalam penelitian dengan menggunakan teori pendekatan Intermedistik, hubungan dalam konteks interaksi dan aktivitas dapat dijelaskan sebagai: Pengaruh untuk mengubah arah kebijakan dari berbagai macam situasi mulai dari luar maupun dalam negeri. Dampak yang diselaraskan apakah kebijakan tersebut menguntungkan atau tidak bagi sebuah negara. Selanjutnya adalah Respon, bagaimana suatu Negara yang berdaulat merespon kebijakan-kebijakan baru dari Negara lain, terhadap pengadapsian lingkungan tersebut bagi Negara mereka.

1.5.2.4 Tabel Kerangka Berpikir

Berdasarkan pada rumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teori yang mendukung analisis hasil penelitian, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Bagan 1.1 Kerangka Berpikir

1.5.2.5 Argumen Utama

Dari kerangka berpikir yang telah diterangkan di atas pemerintah China melarang penggunaan *stablecoin cryptocurrency* karena terdapat 2 alasan penting. Yang pertama adalah alasan dari faktor internal, sedangkan yang kedua alasan faktor eksternal. Faktor internal dalam konteks penggunaan *stablecoin cryptocurrency* sendiri adalah gangguan dalam mekanisme ekonomi yang dihadapi oleh pemerintah China. Sedangkan faktor eksternal dalam konteks *stablecoin cryptocurrency* adalah bentuk dari *hacking*, *hijacking* dan *money laundering* sebagai bentuk ancaman *spionase* dari negara asing yang di duga dapat mengguncang kedaulatan ekonomi negara China.

Kedua faktor ini yang tentunya sangat berpotensi sekali dalam mengganggu keamanan nasional negara China, sehingga dengan respon yang diterima serta untuk mencegah dampak yang ditimbulkan lebih dalam kedaulatan ekonomi, pemerintah China akhirnya melarang penggunaan *stablecoin cryptocurrency* terhadap warga negaranya baik di dalam maupun luar negeri.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk pada tipe atau jenis penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas

peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁶ Menurut Mas'ood tipe penelitian deskriptif adalah upaya untuk menjawab pertanyaan “apa” dan “mengapa”.²⁷

Menurut Koentjaraningrat, penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat tentang sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Selain itu untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.²⁸ Sedangkan, menurut Whitney tipe penelitian deskriptif adalah penelitian dengan pencarian fakta dengan interpretasi tepat.²⁹ Sedangkan menurut Sugiyono tipe penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.³⁰

Menurut Silalahi tipe penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menyajikan gambaran secara terperinci atau mendetail tentang situasi khusus, setting social atau hubungan dengan mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia, benda atau peristiwa. Dalam penelitian ini melibatkan proses konseptualisasi.³¹ Penulis menggunakan tipe

²⁶ Indianto Muin. 2005. *Sosiologi SMA untuk kelas XII. Jilid 3*. Jakarta: Erlangga. h. 85-86.

²⁷ Mohtar Mas'ood. 2003. *Disiplin dan Metodologi*. h. 262.

²⁸ Koentjaraningrat. 1994. *Metode-Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. h. 29.

²⁹ Whitney, F. 1960. *The Element Of Research*. NewYork : Prentice-Hal, Inc. h. 29.

³⁰ Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta. h. 37.

³¹ Ulber Silalahi. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Unpar Press. 31-32.

penelitian deskriptif karena penelitian ini menjawab pertanyaan mengapa pemerintah China mengeluarkan kebijakan untuk pelarangan dalam penggunaan *stablecoin cryptocurrency* di dalam maupun luar negeri pada tahun 2017-2022.

1.6.2 Jangkauan penelitian

Jangkauan penelitian berkaitan dengan seberapa jauh jangkauan penelitian yang dilakukan atau batasan dalam sebuah penelitian. Untuk membatasi analisis, jangkauan penelitian ini dibatasi oleh jangka waktu penelitian yaitu tahun 2017 hingga tahun 2022. Jangkauan waktu penelitian tersebut dipilih karena pada tahun 2017 pihak pemerintah China pertama kali memulai lebih dalam dalam menangani segala kasus-kasus yang berhubungan dengan *cryptocurrency*, menurut laporan dari Central bank of China, pemerintah China melakukan pelarangan terhadap ICO (*Initial Coin Offering*), Bank Central China menganggap bahwa ICO merupakan *Money Laundering activity*, ICO juga mengancam stabilitas ekonomi Negara dan menimbulkan resiko kegagalan bisnis dalam negeri.

Pada tahun 2021 pemerintah bersama dengan Bank Central China mengeluarkan statement bahwa persetujuan dan pernyataan bersama yang telah dirilis, ketentuan pelarangan berikut telah diumumkan: yang pertama Regulator China telah menganggap semua transaksi *cryptocurrency dan stablecoin*, perdagangan dan investasi dalam instrument tersebut sebagai tindakan ilegal, baik yang dilakukan melalui platform lokal atau asing. Ini termasuk semua transaksi *Bitcoin* maupun *USDT*. Yang kedua warga negara China yang bekerja dalam peran

pemasaran atau dukungan teknis untuk pertukaran mata uang asing sekarang akan dikenakan tuntutan hukum. Yang ketiga NDRC telah menetapkan rencana untuk melarang semua kegiatan dari penambangan *cryptocurrency*, tindakan jual beli dan tindakan menukar antar *cryptocurrency* dengan memutuskan investasi di sektor ini, meningkatkan biaya energy khususnya listrik dan memblokir semua kegiatan dari perusahaan baru memasuki industry *cryptocurrency* tanpa perjanjian dari pihak pemerintah.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling utama dalam penelitian. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, sehingga teknik pengumpulan data menjadi sangat penting untuk dilakukan untuk memenuhi standar data penelitian yang akan ditetapkan. Teknik pengumpulan data menurut Neuman dapat dibagi menjadi dua yaitu teknik pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif.³² Pengumpulan data secara kualitatif lebih dilakukan melalui wawancara, observasi, focus discussion group dan studi literatur. Sedangkan pengumpulan data kuantitatif cenderung menggunakan sebuah alat bantu seperti survei, kuisisioner dan mesin (statistik).³³

³² Ulber Silalahi.2006.*Metode Penelitian Sosial*.Bandung:Unpar Press. h. 121-123.

³³ W. Laurence Neuman.1991.*Sosial Research Methods: Qualitative and Quantitative Aproaches*.Boston:Allyn and Bacon. h. 219

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara. Dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen. Dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan juga sumber sekunder.³⁴ Sumber primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh, dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti secara langsung. Adapun menurut J. Supranto, sumber primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung melalui subjek maupun obyeknya. Sedangkan, sumber sekunder merupakan sumber yang tidak diperoleh secara langsung dari objek atau subjek penelitian.³⁵

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer diperoleh dari pidato terstruktur, observasi dan dokumentasi dari pemerintah china. Pidato terstruktur sendiri dilakukan dengan Pemerintah China yang menyebarkan langsung terhadap media berita resmi. Observasi dilakukan dengan pengamatan di beberapa media berita yang di publikasi oleh Pemerintah China. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan pengumpulan dokumen-dokumen berupa pidato dan arsip data-data yang di publikasikan oleh pihak Pemerintah China dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Adapun untuk data sekunder diperoleh dengan

³⁴ Sugiyono.2017.*Metode Penelitian Kualitatif*.Bandung:PT Alfabeta.h. 104.

³⁵ J. Supranto.Hal: 120.1997.*Dalam pdf oleh B Ardimas.2007.Bab II Metodologi Penelitian.[Daring]* Dalam eprints.undip.ac.id/34667/6/1734_CHAPTER_III.pdf. Diakses pada tanggal 23 February 2022.

studi kepustakaan (*literature review*) dengan mengumpulkan pustaka-pustaka pendukung penelitian.

1.6.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pidato, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca atau diri sendiri.³⁶

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Analisis data kualitatif lebih bersifat deskriptif, yaitu suatu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman, aktivitas dalam analisis data kualitatif yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) atau *verification*.

Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif karena permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang membutuhkan pendekatan

³⁶ Sugiyono.2017.*Metode Penelitian Kualitatif*.Bandung : PT Alfabeta.h. 131.

melalui teknik pengumpulan data primer dimana proses pengumpulan data dititikberatkan pada pidato dan observasi, sehingga analisis datanya berupa analisis tekstual dari hasil dokumentasi media atau catatan observasi lapangan yang dilakukan oleh Pemerintah China sendiri.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam empat bab utama. Empat bab akan dipaparkan secara berurutan seperti berikut:

BAB I merupakan metodologi penulisan yang tersusun atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, kerangka pemikiran, metodologi penelitian yang terdiri dari, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan penguraian dan penjelasan tentang penggunaan *stablecoin cryptocurrency* di China, yang meliputi kegiatan Organisasi, Perusahaan (*Company*), serta pihak individu, sebelum ada aturan kebijakan untuk melarang penggunaan *cryptocurrency* diterapkan.

BAB III merupakan penguraian dan penjelasan tentang data-data serta profil objek dari penelitian yaitu menjelaskan berbagai faktor-faktor internal dan eksternal yang dianggap oleh pemerintah China dengan mempertimbangkan respon dan dampak dari terbentuknya ancaman *hacking, hijacking, money laundering*, sebagai bentuk lahan *spionase* yang mengancam dari negara asing, sebagai bentuk pertahanan dan perlindungan ekonomi dalam dan luar negeri.

BAB IV adalah bab kesimpulan dan saran dimana uraian akan ditutup dengan bab kesimpulan yang berusaha menegaskan hasil penelitian. Bab ini, akan menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian dipaparkan juga beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi objek penelitian maupun untuk pemerintah, masyarakat dan untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan fokus yang sama yaitu mengenai peran pemerintah China dalam mengeluarkan kebijakan dalam maupun luar negeri terhadap penggunaan *stablecoin cryptocurrency*.